

## **PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Yuniarti Reny Renggo, email: [renyrennggo@unkriswina.ac.id](mailto:renyrennggo@unkriswina.ac.id)  
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Unkriswina Sumba

### *Abstract*

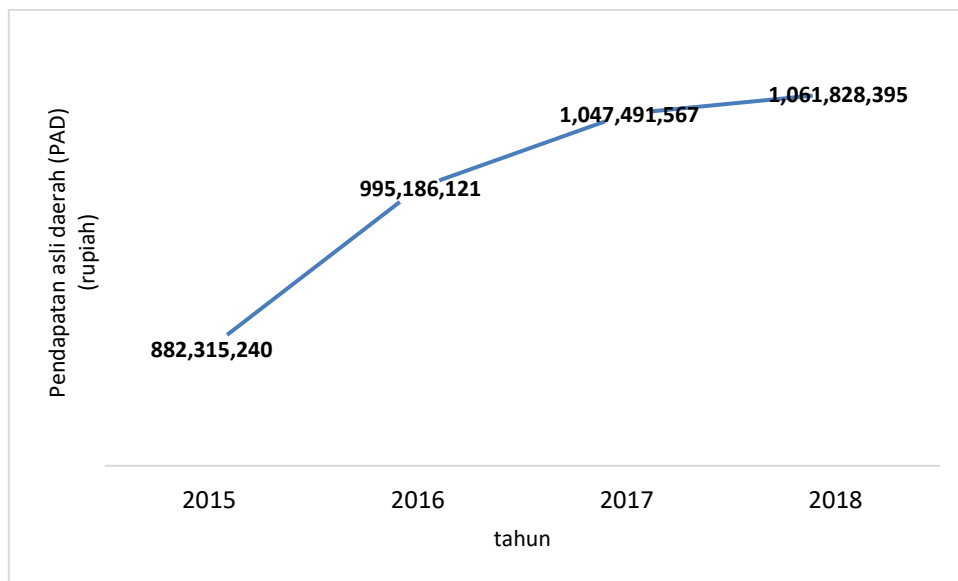
*The ability to manage regional finances is seen from the performance of regional finances, where regional financial performance can be an indicator to measure the success of the region in implementing regional autonomy. This study aims to see the effect of regional financial performance on economic growth and unemployment in East Nusa Tenggara Province from 2016 to 2019. Using panel data regression analysis and indicators of financial performance, among others, independence ratios, effectiveness ratios and efficiency ratios. The results obtained in this study are, the independence ratio is classified as low criteria with a consultative relationship pattern does not have a significant effect on economic growth and the unemployment rate, the effectiveness ratio is classified as very effective but does not have a significant effect on economic growth and the unemployment rate, while the efficiency ratio is classified as quite efficient significantly reduce economic growth but not the unemployment rate.*

**Keywords:** *Regional Financial Performance, Economic Growth, Unemployment Rate*

### **PENDAHULUAN**

Setelah sepuluh tahun lebih berjalan, pelaksanaan otonomi daerah belum terpenuhi secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Berliani, 2016). Otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah untuk bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah dengan berlandaskan Undang-undang (UU) No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 (Sularso & Restianto, 2011), oleh karena itu setiap daerah diharapkan harus mandiri. Kemandirian suatu daerah dicerminkan dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Febiani & Suseno, 2013).

Otonomi daerah juga diharapkan agar mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hal pengelolaan keuangan daerah, karena pengelolaan keuangan yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah (Sularso & Restianto, 2011). Pendapatan Asli Daerah Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, seperti yang digambarkan pada gambar 1.



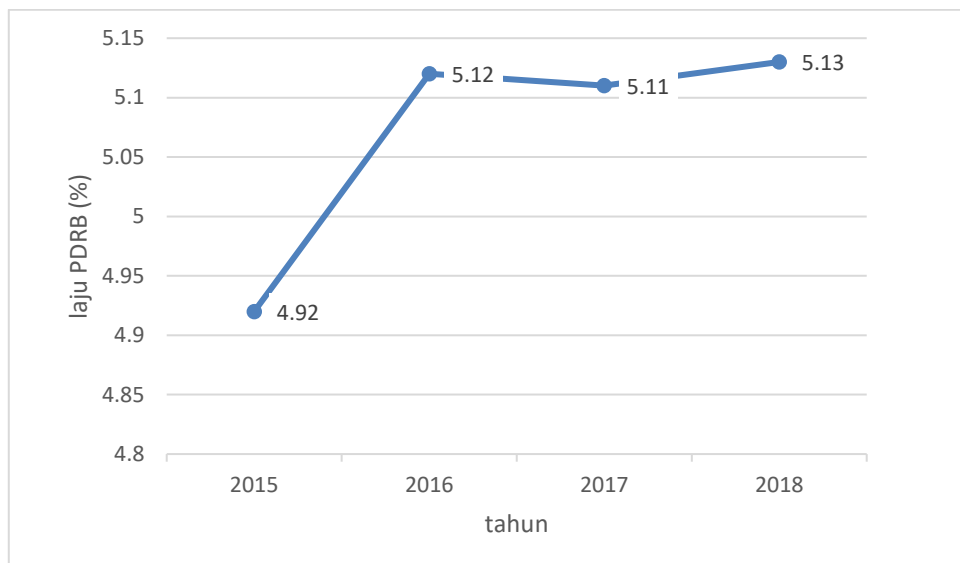
Sumber : data olahan

**Gambar 1.**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 – 2018

Peningkatan pendapatan asli daerah tersebut menggambarkan bahwa pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya dalam menggali kemampuan daerah. Upaya pemerintah dilihat dari kinerja keuangannya yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah, dimana bisa juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Sularso & Restianto, 2011). Penyelenggaraan otonomi daerah yang baik dapat menciptakan tercapainya pertumbuhan ekonomi (Ani & Dwirandra, 2014) dan pertumbuhan ekonomi yang baik akan berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat (S. Astuti & Mispiyanti, 2019).

Laju pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (BPS, 2017b) untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2015 – 2018 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, seperti yang disajikan pada gambar 2 berikut ini:



Sumber : BPS, 2019

**Gambar 2.**

Laju Pertumbuhan PDRB provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 - 2018

Sejak tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0.2 sejak tahun 2015, kemudian mengalami penurunan sebesar 0.1 pada tahun 2017 hingga meningkat lagi pada tahun 2018 sebesar 0.02. perubahannya mengalami fluktuasi namun sangat lambat atau dengan kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat lambat. Perubahan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor dan salah satunya adalah pengelolaan keuangan pada pemerintahan yang berjalan dengan baik (Siregar, 2016).

Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah, yaitu dengan cara mengelola sumber daya yang ada dan membentuk lapangan kerja baru (Suwandi & Tahar, 2015).

**Tabel 1.**

Tingkat Pengangguran terbuka Kawasan Indonesia Timur (KWT) tahun 2016-2019

PROVINSI	2016		2017		2018		2019	
	Feb	Agu	Feb	Agu	Feb	Agu	Feb	Agu
Bali	2,12	1,89	1,28	1,48	0,86	1,37	1,19	1,52
Sulawesi Barat	2,72	3,33	2,98	3,21	2,45	3,16	1,45	3,18
Sulawesi Tenggara	3,78	2,72	3,14	3,3	2,79	3,26	2,96	3,59
Ntt	3,59	3,25	3,21	3,27	2,98	3,01	3,1	3,35
Papua	2,97	3,35	3,96	3,62	2,91	3,2	3,42	3,65
Sulawesi Tengah	3,46	3,29	3,97	3,81	3,19	3,43	3,54	3,15
Ntb	3,66	3,94	3,86	3,32	3,38	3,72	3,27	3,42
Gorontalo	3,88	2,76	3,65	4,28	3,62	4,03	3,74	4,06
Maluku Utara	3,43	4,01	4,82	5,33	4,65	4,77	5,09	4,97
Sulawesi Selatan	5,11	4,8	4,77	5,61	5,39	5,34	5,42	4,97

Papua Barat	5,73	7,46	7,52	6,49	5,67	6,3	5,28	6,24
Sulawesi Utara	7,82	6,18	6,12	7,18	6,09	6,86	5,37	6,25
Maluku	6,98	7,05	7,77	9,29	7,38	7,27	6,91	7,08

Sumber: *bps.go.id*

Tabel 1 memperlihatkan bahwa Tingkat Pengangguran di provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan jika dibandingkan dengan provinsi lainnya masih tergolong rendah. Pada tahun 2016 Provinsi NTT menduduki peringkat ke 7 dan lebih banyak dibandingkan Bali, Sulawesi Barat, Papua, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran menurun namun masih lebih banyak tingkat pengangguran jika dibandingkan dengan Bali, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Pada tahun 2018 dan tahun 2019, provinsi Nusa Tenggara Timur tingkat penganggurannya menurun lebih sedikit dari Sulawesi Tenggara dan yang lainnya namun masih lebih dari Bali dan Sulawesi Barat.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya, jika dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, partisipasi, transparansi, akuntansi dan keadilan akan mampu untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Wadma, 2016) sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan diperluasnya lapangan pekerjaan (Berliani, 2016).

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB pada Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan mengalami pertumbuhan yang sangat lambat, dan diikuti dengan tingkat pengangguran yang menurun setiap tahunnya. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengangguran yang menurun juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik, dimana keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu bagaimana pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di provinsi Nusa Tenggara Timur. Harapan besar dengan adanya penelitian ini maka dapat membantu pemerintah provinsi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran di daerah.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi merupakan pengertian dari kinerja. Apabila pencapaian sesuai dengan yang

direncanakan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja bagus. Begitupun sebaliknya apabila tidak sesuai dengan yang direncanakan maka dapat dikatakan kinerjanya jelek (Wadma, 2016).

Kinerja keuangan adalah ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan, dimana analisisnya dilakukan untuk menilai kinerja pada masa lalu dengan melakukan berbagai analisis agar memperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Berliani, 2016).

Keuangan daerah harus diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna karena keuangan daerah sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan pelayanan masyarakat (S. Astuti & Mispian, 2019). Kinerja keuangan pemerintah diukur melalui rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio efektivitas dari keuangan daerah (W. Astuti, 2015).

Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan aktivitasnya (Nurulita, Arifulsyah, & Yefni, 2018), seperti membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Berliani, 2016). Rasio kemandirian diukur dengan (Sularso & Restianto, 2011):

$$Kemandirian\ Fiskal = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Transfer\ Pusat + Prop + Pinjaman} \times 100\%$$

Sumber dana eksternal juga merupakan salah satu faktor yang menjadi ketergantungan dari rasio kemandirian, dimana jika semakin tinggi rasio kemandirian maka akan tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah begitupun sebaliknya jika semakin rendah rasio kemandirian maka akan rendah ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal (Wadma, 2016). Berikut pedoman penilaian keuangan daerah:

**Tabel 2.**  
Pedoman Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
<b>Rendah Sekali</b>	0 – 25	Instruktif
<b>Rendah</b>	25 – 50	Konsultatif
<b>Sedang</b>	50 – 75	Partisipatif
<b>Tinggi</b>	75 – 100	Delegatif

Sumber: (Berliani, 2016)

Efektivas berhubungan dengan derajat keberhasilan kegiatan sektor publik, semakin besar pengaruh dari suatu kegiatan terhadap penyediaan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang sudah ditetapkan maka kegiatan tersebut akan dikatakan efektif (Wadma, 2016). Rasio efektivitas digunakan

untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membandingkan realisasi PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan yang harus berdasarkan potensi riil daerah (Sularso & Restianto, 2011).

Untuk mengukur rasio efektivitas keuangan daerah dapat menggunakan formula sebagai berikut (Nurulita et al., 2018):

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ PAD}{Target\ PAD} \times 100\%$$

**Tabel 3.**

Pedoman Penilaian dan Kinerja Efektivitas terhadap PAD

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
<b>100 – ke atas</b>	Sangat Efektif
<b>90 -100</b>	Efektif
<b>80 – 90</b>	Cukup Efektif
<b>60 - 80</b>	Kurang Efektif
<b>Dibawah 60</b>	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun (2006) dalam (Berliani, 2016)

Rasio efektivitas harus disandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai oleh pemerintah daerah agar dapat memperoleh ukuran ukuran yang lebih baik (Sularso & Restianto, 2011), Halim (2004) dalam (Siregar, 2016) mengemukakan bahwa rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan realisasi penerimaan yang diterima. Formula yang akan digunakan untuk menghitung besarnya rasio efisiensi adalah sebagai berikut (Nurulita et al., 2018):

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Pengeluaran}{Realisasi\ Penerimaan} \times 100\%$$

**Tabel 4.**

Pedoman Penilaian Dan Kinerja Efisiensi Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
<b>Dibawah 60</b>	Sangat Efisien
<b>60 – 80</b>	Efisien
<b>80 – 90</b>	Kurang Efisien
<b>90 – 100</b>	Cukup Efisien
<b>100 – ke atas</b>	Tidak Efisien

Sumber: Mahsun (2006) dalam (Berliani, 2016).

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat

meningkat merupakan arti dari pertumbuhan ekonomi secara umum (Wadma, 2016). Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto riil (Siregar, 2016). Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan adanya indikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Formula pertumbuhan PDRB yang digunakan adalah:

$$\text{Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100$$

### **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan maka mereka belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang mereka inginkan (Renggo, 2015). Bentuk – bentuk pengangguran adalah (S. Astuti & Mispiyanti, 2019):

1. Pengangguran terbuka, adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok .
2. Setengah pengangguran, adalah mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga pengangguran dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas produksi secara langsung
3. Tenaga kerja yang lemah, adalah mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakitan
4. Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

Tingkat pengangguran yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan kelompok penduduk yang termasuk angkatan kerja dengan usia kerja 15 tahun s.d 64 tahun yang tidak bekerja, dengan skala rasio maka formulanya adalah sebagai berikut (Nurulita et al., 2018):

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

### **Penelitian Terdahulu**

Pada tahun 2014, Ani & Dwirandra meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan daerah pada pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan pada provinsi bali dengan menggunakan sampel jenuh. Hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, dimana kinerja keuangan terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan hasil

yang diperoleh adalah kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio efektivitas, rasio efisiensi dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain melihat pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, Ani & Dwirandra juga melihat pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat pengangguran, dimana hasil yang diperoleh adalah kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

(Nurulita et al., 2018) melakukan penelitian yang serupa namun di provinsi yang berbeda yaitu provinsi Riau. Hasil yang ditemukan adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio kemandirian dan rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi namun rasio efisiensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga ditemukan bahwa kinerja keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi juga diteliti di provinsi Jawa Tengah oleh S. Astuti & Mispriyanti (2019), hasil yang diperoleh adalah kinerja keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kinerja keuangan daerah berupa rasio efisiensi berpengaruh pada pengangguran sedangkan kemandirian dan efektivitas tidak berpengaruh terhadap pengangguran.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat kita lihat bahwa pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran sangat bervariasi, ada daerah yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan ada daerah yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Bahkan pula ada yang kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak semua variabel berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain:

- H1 : rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
- H2 : rasio Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
- H3 : rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
- H4 : rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran
- H5 : rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran
- H6 : rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

## **METODE**

### **Data dan Sumber Data**



Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari tahun 2016 hingga tahun 2018, karya ilmiah baik jurnal dan lainnya, studi literatur dari buku, internet dan sumber lain yang relevan.

**Alat Analisis**

Teknik analisis data yang digunakan adalah data panel yang terdiri dari gabungan antara data waktu yaitu 3 tahun sejak tahun 2016 – 2019 dan data *cross section* yaitu 22 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alat analisis yang digunakan adalah *views 9*.

$$\begin{aligned} \text{Model 1} \quad PE_{it} &= \alpha_{it} + \beta_1 RKM_{it} + \beta_2 REV_{it} + \beta_3 REN_{it} + e_{it} \\ \text{Model 2} \quad TP_{it} &= \alpha_{it} + \beta_1 RKM_{it} + \beta_2 REV_{it} + \beta_3 REN_{it} + e_{it} \end{aligned}$$

Keterangan:

- PE : pertumbuhan ekonomi → rasio
- TP : tingkat pengangguran → rasio
- RKM : rasio tingkat kemandirian → rasio
- REV : rasio efektivitas → rasio
- REN : rasio efisiensi → rasio

**HASIL DAN ANALISIS**

**Kinerja Keuangan Daerah**

pelaksanaan Otonomi Daerah sudah dijalankan cukup lama pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan telah dilakukan berbagai perbaikan regulasi khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya bagi daerah, dimana jika pengelolaan keuangan dilakukan secara baik dan benar maka bisa menjadikan daerah yang kuat dan berkuasa, namun jika tidak dilakukan secara baik dan benar maka akan menjadikan daerah sebagai daerah yang tidak berdaya (Wadma, 2016).

Keuangan daerah dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah, dimana anggaran sebagai instrumen kebijakan harus memuat kinerja (Wadma, 2016), dimana kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan (Berliani, 2016), dan kinerja keuangan pemerintah merupakan suatu standar untuk menilai kemampuan pemerintah dalam mendanai input dan seberapa jauh pemerintah mengikuti proses dari target yang ditetapkan (Nurulita et al., 2018). Beberapa hal ukuran kinerja yang diperhitungkan untuk mengukur kinerja keuangan adalah rasio kemandirian (RKM), rasio efektivitas (REV) dan rasio efisiensi (REN).

### Rasio Kemandirian (RKM)

Kemandirian keuangan daerah dapat menggambarkan bahwa suatu daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahnya, dan PAD sangat memiliki peranan yang penting karena diharapkan dapat menjadi bagian terbesar dari semua pendapatan daerah agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat (Berliani, 2016).

Mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan aktivitasnya, alat analisis yang digunakan adalah Rasio Kemandirian.

**Tabel 5**  
Rasio Kemandirian Provinsi NTT tahun 2016 – 2019

<b>TAHUN</b>	<b>RASIO KEMANDIRIAN</b>	<b>KEMAMPUAN DAERAH</b>	<b>POLA HUBUNGAN</b>
2016	35%	RENDAH	KONSULTATIF
2017	29%	RENDAH	KONSULTATIF
2018	30%	RENDAH	KONSULTATIF
2019	31%	RENDAH	KONSULTATIF

Sumber: data olahan (Kemenkeu, 2020)

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa tingkat kemandirian daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuasi sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 rasio kemandirian sebesar 35% lalu turun menjadi 29% namun meningkat kembali menjadi 31%. Walaupun rasio kemandirian mengalami fluktuasi namun selama 4 tahun kemampuan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada kemampuan daerah yang rendah dengan pola hubungan konsultatif.

Maksud dari pola hubungan konsultatif adalah campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini dikarenakan daerah sudah dianggap untuk sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. Atau dengan kata lain, Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sedikit bisa memanfaatkan sumber daya yang ada untuk dijadikan pendapatan.

### Rasio Efektivitas (REV)

Halim (2004) dalam Siregar (2016) mengemukakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dibandingkan dengan target yang ditetapkan dapat mencerminkan efektivitas keuangan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah dikatakan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai lebih dari 100%, oleh karena itu semakin besar rasio efektivitas maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah Halim (2008) dalam Berliani (2015).

**Tabel 6**  
Rasio Efektivitas Provinsi NTT tahun 2016 – 2019

<b>TAHUN</b>	<b>RASIO EFEKTIVITAS</b>	<b>KRITERIA</b>
2016	103	SANGAT EFEKTIF
2017	104	SANGAT EFEKTIF
2018	103	SANGAT EFEKTIF
2019	111	SANGAT EFEKTIF

Sumber: data Olahan (Kemenkeu, 2020)

Rasio Efektivitas selama empat tahun terakhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 104%. Rasio efektivitas mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga 2019 namun masih berada pada kriteria sangat efektif, hal ini karena rasio efektivitas lebih dari 100%. Kriteria sangat efektif menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencapai tujuan dan sasaran akhir dalam pembangunan daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

### **Rasio Efisiensi (REN)**

Perbandingan antara belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan realisasi pendapatan yang diterima merupakan penggambaran dari rasio efisiensi.

**Tabel 7**  
Rasio Efisiensi Provinsi NTT tahun 2016 – 2019

<b>TAHUN</b>	<b>RASIO EFISIENSI</b>	<b>KRITERIA</b>
2016	96	CUKUP EFISIEN
2017	99	CUKUP EFISIEN
2018	101	TIDAK EFISIEN
2019	99	CUKUP EFISIEN

Sumber: data Olahan (Kemenkeu, 2020)

Perbandingan ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak tahun 2016 hingga 2019 rasio efisiensi mengalami fluktuasi, dimana sejak tahun 2016 cukup efisien menurun pada tahun 2018 menjadi tidak efisien namun mengalami peningkatan lagi menjadi cukup efisien. Berada dalam kriteria cukup efisien dapat menggambarkan bahwa dalam menggunakan anggaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah cukup baik, sudah cukup sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran**

Pengaruh antar variabel dianalisis dengan menggunakan data panel dimana terdiri dari 22 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan durasi 4 tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2019.

**Tabel 8**  
Statistik Deskriptif

<b>variabel</b>	<b>observasi</b>	<b>minimum</b>	<b>maximum</b>	<b>mean</b>	<b>Std. Dev.</b>	<b>probability</b>
PE	88	4.265042	6.827716	5.120858	0.414766	0.000000
TP	88	0.497274	14.24107	3.300355	2.311916	0.000000
RKM	88	3.713625	24.71902	7.983989	3.885553	0.000000
REV	88	39.92509	273.0557	111.1123	36.37230	0.000000
REN	88	83.59904	117.8391	100.8380	4.015403	0.000000

Sumber: data olahan (BPS, 2017, 2018, 2019)

Berdasarkan tabel 8 dapat disimpulkan bahwa total observasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 88 hal ini diperoleh dari 22 sampel penelitian dikalikan dengan periode penelitian selama 4 tahun. Nilai minimum terendah dimiliki oleh variabel Tingkat pengangguran sebesar 0.497 dan nilai maksimum tertinggi oleh variabel rasio efektivitas sebesar 273.055. Dari kelima variabel terlihat memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata, hal ini menggambarkan kelima variabel memiliki tingkat variasi data yang rendah. Variasi data yang rendah menyebabkan data tidak berdistribusi normal, hal ini diperlihatkan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  (0.05). Untuk mengatasi ketidaknormalan maka data panel ditransformasikan dalam bentuk log sehingga menjadi linear, sebagai berikut:

$$lPE_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 lRKM_{it} + \beta_2 lREV_{it} + \beta_3 lREN_{it} + e_{it}$$

$$lTP_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 lRKM_{it} + \beta_2 lREV_{it} + \beta_3 lREN_{it} + e_{it}$$

Metode yang akan digunakan dalam model panel ini adalah Common Effect, model Fixed Effect, dan Random Effect. Common Effect merupakan metode yang tidak melihat perbedaan individu dan antar waktu, hanya dengan menggabungkan data time series dan cross section (Sari, Kindangen, & Rotinsulu, 2019). Fixed Effect merupakan suatu model yang dapat menunjukkan perbedaan konstanta antar objek meskipun dengan koefisien regresor yang sama (Winarno, 2015). Random Effect merupakan metode yang menggunakan estimasi Generalized Least Square (GLS) dikarenakan efek spesifik diperlakukan sebagai bagian dari komponen error yang bersifat acak serta tidak berkorelasi dengan variabel penjelas (Widarjono, 2016).

Setelah mengestimasi ketiga model tersebut maka perlu dilakukan pemilihan model yang tepat agar sesuai dengan tujuan penelitian (Sari et al., 2019), dan terdapat dua pengujian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian Chow Test dan Pengujian Hausman Test. Uji Chow Test digunakan untuk menentukan teknik yang paling tepat antara Common Effect (metode OLS tanpa variabel dummy) atau metode Fixed Efek (Widarjono, 2016). Sedangkan uji

Hausman Test merupakan pengujian untuk mempertimbangkan penggunaan pendekatan Fixed Efek dan pendekatan Random Efek (Firdaus, 2020).

**Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

**Tabel 9**  
Hasil Uji Chow Test dan Hausman Test

<b>Uji Chow Test</b>			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.009940	(21,63)	0.0000
Cross-section Chi-square	152.69633	21	0.0000
2			
<b>Hausman Test</b>			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.409558	3	0.0154

Sumber : data olahan (eviews 8)

Tampilan tabel 9 dapat dilihat nilai dari cross-section f, dimana nilai probabilitas (prob) untuk cross-section f < 0.05 (tingkat signifikan penelitian). Dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah model fixed efek jika dibandingkan dengan model comment efek. Dapat dilihat pula hasil uji dari Hausman Test, dimana yang harus diperhatikan adalah nilai dari Cross-Section random. Probabilitas (prob) untuk Cross-section random adalah sebesar 0.0003 dan itu lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  (0.05), sehingga dapat kita simpulkan bahwa model yang akan terpilih antara Random Efek dan Fixed Efek adalah model Fixed Efek. Berdasarkan uji Hausman maka hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 10**  
Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variable	Coefficient	Prob.
C	2.330308	0.0000
LRKM?	0.036808	0.1285
LREV?	-0.014377	0.5155
LREN?	-0.15328	0.0754***
Adjusted R-squared	0.856139	
Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: data olahan (eviews 8)

Keterangan: \*sig pada  $\alpha = 1\%$  (0.01), \*\*sig pada  $\alpha = 5\%$  (0.05), \*\*\*sig pada  $\alpha = 10\%$  (0.10)

Nilai prob (f-statistic) adalah sebesar 0.00 dan lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  (0.05), hal ini berarti bahwa analisis regresi data panel pada model 1 bisa digunakan untuk memprediksikan pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pembangunan ekonomi, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh renggo (2019) bahwa model PAD, DAK dan DAU yang merupakan sumber keuangan daerah dapat

menjelaskan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Koefisien determinasi pun menunjukkan nilai sebesar 0.856139, yang mana hal ini menyatakan arti bahwa 85% perubahan yang dialami oleh variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh kinerja keuangan daerah sedangkan 15% lainnya dijelaskan oleh variabel yang berada di luar model.

$$IPE_{it} = 2.330308 + 0.036808 IRKM_{it} - 0.014377 IREV_{it} - 0.0754 IREN_{it} + e_{it}$$

Persamaan ini menunjukkan nilai konstanta sebesar 2.33 dan positif, hal ini menunjukkan arti bahwa apabila rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi konstan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 2.33.

Berdasarkan tabel 11 digambarkan bahwa variabel rasio kemandirian dan rasio efektivitas tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel rasio efisien berpengaruh signifikan dengan  $\alpha = 10\%$  (0.10) terhadap pertumbuhan ekonomi.

Koefisien regresi dari rasio efisien (REN) bernilai  $- 0.0754$ , dimana nilai negatif berarti bahwa rasio efisiensi berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana dengan meningkatnya persentase dari rasio efisiensi sebesar 1% maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.0754, semakin tinggi rasio efisiensi suatu daerah maka akan semakin tergolong dalam kriteria tidak efisien. Berarti bahwa semakin tinggi rasio efisien pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pemerintah semakin tidak efisien menggunakan anggaran sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan, dan dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun.

hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurulita et al. (2018), dimana rasio kemandirian dan rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh S. Astuti & Mispianiti (2019), dimana ditemukan bahwa kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Pengangguran**

**Tabel 11**  
Hasil Uji Chow Test dan Hausman Test

<b>Ujin Chow Test</b>			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.081344	(21,63)	0.0000
Cross-section Chi-square	87.203237	21	0.0000

Uji Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.143091	3	0.3701

Sumber : data olahan (eviews 8)

Nilai dari probabilitas (prob) cross-section f yang ditampilkan pada tabel 12 adalah sebesar 0.000, hal ini berarti bahwa nilai probabilitas (prob) untuk cross-section  $f < 0.05$  (tingkat signifikan penelitian). Kesimpulan yang diperoleh adalah model fixed efek lebih baik jika dibandingkan dengan model comment efek. Hasil uji dari Hausman test memperlihatkan bahwa nilai dari Probabilitas (prob) untuk Cross-section random adalah sebesar 0.3701, dimana nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  (0.05). Nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikan menggambarkan bahwa model yang layak dipakai adalah model random efek jika dibandingkan dengan model fixed efek. Oleh karena itu, hasil regresi yang dipakai adalah sebagai berikut:

**Tabel 12**  
Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Pengangguran

Variable	Coefficient	Prob.
C	-4.740465	0.3996
LRKM?	0.334467	0.1250
LREV?	-0.341238	0.1420
LREN?	1.446867	0.2292
Adjusted R-squared	0.118486	
Prob(F-statistic)	0.266828	

Sumber: data olahan (eviews 8)

Keterangan: \*sig pada  $\alpha = 1\%$  (0.01), \*\*sig pada  $\alpha = 5\%$  (0.05), \*\*\*sig pada  $\alpha = 10\%$  (0.10)

Probabilitas (f-statistic) memiliki nilai lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  (0.05), dimana hal ini berarti analisis regresi data panel pada model 2 tidak begitu bagus bila digunakan dalam memprediksi pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini juga lebih diperjelas dengan nilai koefisien determinasi yang hanya sebesar 0.118486, yang menyatakan bahwa hanya 11% perubahan yang terjadi pada variabel tingkat pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan kinerja keuangan, sedangkan 89% lainnya dipengaruhi oleh variabel yang berasal dari luar model. Persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$ITP_{it} = -4.740465 + 0.334467 IRKM_{it} - 0.341238 IREV_{it} + 1.446867 IREN_{it} + e_{it}$$

Konstanta dalam persamaan ini menunjukkan nilai negatif yang artinya bila variabel kinerja keuangan dianggap tetap atau ceteris paribus maka besarnya tingkat pengangguran akan berkurang sebesar 4.74. tabel 14 juga menggambarkan tingkat signifikan dari variabel, ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya. Variabel rasio kemandirian, variabel rasio efektivitas, dan rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat pengangguran.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah tidak dapat menentukan perubahan bagi tingkat pengangguran, baik itu meningkatkan pengangguran maupun menurunkan tingkat pengangguran yang ada pada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurulita et al., (2018) dan S. Astuti & Mispiyanti (2019) dimana ditemukan bahwa kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febiani & Suseno (2013), yang menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan meningkatkan pengangguran.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kinerja keuangan daerah yang terdiri dari variabel rasio kemandirian yang tergolong rendah dengan pola hubungan konsultatif dan rasio efektifitas yang tergolong sangat efektif pada Provinsi Nusa Tenggara Timur selama empat tahun, sejak tahun 2016 – 2019 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel Rasio Efisiensi yang tergolong cukup efisien berpengaruh signifikan menurunkan pertumbuhan ekonomi namun tidak berpengaruh signifikan pada tingkat pengangguran.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti merekomendasikan beberapa saran untuk pemerintah dan untuk peneliti selanjutnya. Bagi pemerintah diharapkan agar berusaha meningkatkan PAD agar bisa mandiri dan mengoptimalkan sumber daya lokal agar dapat meningkatkan produktifitas masyarakat serta meningkatkan kualitas SDM, dikarenakan kualitas SDM dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dengan begitu kemandirian bisa mengurangi tingkat pengangguran.

Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan rasio-rasio lainnya dalam kinerja keuangan daerah untuk melihat pengaruh kinerja keuangan dengan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, seperti derajat desentralisasi, rasio kontribusi BUMD, dan rasio belanja modal.

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih diberikan kepada Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan yang sudah memberikan bantuan dana penelitian dosen mandiri (PDM).



**RAFERENSI**

- Ani, N. L. N. P., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(3), 481–497.
- Astuti, S., & Mispiyanti. (2019). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Studi Kasus Kabupaten Yang Ada di Provinsi Jawa Tengah*.
- Astuti, W. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011). *Jurnal EBBANK*, 6(1), 1–18.
- Berliani, K. (2016). Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. *Jurnal Indonesia Membangun*, 1.
- BPS. (2017a). *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2017*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- BPS. (2018). *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- BPS. (2019). *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2019*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- BPS, B. P. S. (2017b). *Kumpulan Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2016*.
- Febiani, R., & Suseno, D. A. (2013). Analisis Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah dan Ketergantungan Daerah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan. 2(4), 446–455.
- Firdaus, M. (2020). *Aplikasi Ekonometrika dengan E-Views, Stata, dan R* (cetakan1 ed.). Bogor: PT Penerbit IPM Press.
- Kemenkeu. (2020). kementerian keuangan. Retrieved from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>
- Nurulita, S., Arifulsyah, H., & Yefni, Y. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Riau. *Jurnal Benefita*, 3(3), 336. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i3.3350>
- Renggo, Y. R. (2015). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2013. *Jurnal Transformatif*, 1(1). Retrieved from <https://ojs.unkriswina.ac.id/index.php/transformatif/article/view/115>
- Renggo, Y. R. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pembangunan Daerah Di Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akrab Juara*, 4(3), 31–46. <https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78>
- Sari, G. N., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun

- 2004 – 2014. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2). <https://doi.org/10.35794/jpek.d.12789.18.2.2016>
- Siregar, H. A. (2016). e-ISSN 2527-8215. *KURS*, 1(1), 140–152.
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1.
- Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *InFestasi*, 11(2), 118. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1127>
- Wadma, S. (2016). *Hubungan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan*.
- Widarjono, A. (2016). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* (edisi keem). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Winarno, W. W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (edisi 4). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.